

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH,
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG)**

Ni Luh Wulan Artini¹

I Putu Deddy Samtika Putra²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of Regional Financial Report Presentation, Financial Statement Accessibility and Internal Control Systems on Regional Financial Management Accountability (Empirical Study at the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) Klungkung Regency). This research was conducted at BPKPD Klungkung Regency with a total sample of 57 employees, with a purposive sampling method. The type of data used is primary data. The data was collected by using questionnaires and data processing using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (a) the regional financial statement presentation variables affect the accountability of regional financial management. (b) the variable of financial report accessibility has no effect on the accountability of regional financial management (c) the variable of the internal control system has no effect on the accountability of regional financial management.

Keywords: *Presentation of Regional Financial Reports, Accessibility of Financial Statements, Internal Control Systems and Accountability of Regional Financial Management.*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan era reformasi yang berlangsung saat ini, memberikan perubahan pada tatanan pemerintahan. Salah satu perubahan tersebut adalah otonomi daerah. Asas otonomi daerah membuat tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) meningkat. Dengan meningkatnya tuntutan tersebut mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang harus dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah di periode berikutnya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan penyajian laporan keuangan yang berperan penting sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimana didalamnya terdapat transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang dilakukan selama periode pelaporan. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah harus menerapkan standar akuntansi yang berlaku umum untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipahami oleh pengguna. Pemerintah juga wajib meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi laporan keuangan agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, dimana pemerintah bertindak sebagai organisasi yang mampu mengelola dana masyarakat.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas dapat dilihat dari kurang relevannya semua informasi yang tertuang dalam laporan tahunan sehingga para pengguna tidak dapat secara langsung mengetahui semua informasi laporan keuangan tersebut. Adanya informasi yang kurang lengkap menyebabkan masyarakat menuntut adanya aksesibilitas untuk memudahkan para pengguna mendapatkan informasi laporan keuangan.

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa “ aksesibilitas laporan keuangan adalah kesanggupan untuk memberikan akses informasi mengenai laporan keuangan yang dapat diperoleh dengan mudah dan dengan biaya murah oleh para pengguna atau pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Somad, (2016) menyatakan bahwa “kemampuan untuk memberikan aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada *stakeholder* adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah”.

Aksesibilitas memberikan fasilitas kepada publik agar dapat menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan melalui kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai sendiri mana laporan keuangan yang benar dan mana laporan keuangan yang salah. Selain itu kasus kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaporan serta pengelolaan keuangan dapat diminimalisir dengan selalu melihat kondisi keuangan daerah. Pemerintah diharapkan mampu memantau setiap kegiatan pengelolaan keuangan daerah agar dapat disajikan dalam laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam meningkatkan kualitas serta keandalan laporan keuangan demi menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan, diperlukan sistem pengendalian yang memadai. Laporan keuangan yang dipublikasikan dapat dipercaya apabila merupakan hasil rancangan dari sistem pengendalian intern yang terarah dari suatu organisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 60/2008 dijelaskan bahwa “ sistem pengendalian intern merupakan suatu proses integral yang dapat menghasilkan keyakinan yang tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam

kegiatan yang efektif seperti menjaga keamanan asset negara, mengevaluasi keandalan laporan keuangan dan mentaati peraturan perundang – undangan”. Proses tersebut dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan serta seluruh pegawai.

Tujuan dari sistem pengendalian intern ini dalam perusahaan yaitu menghindari penyimpangan dari prosedur operasional perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan dalam suatu perusahaan harus memiliki prosedur yang terukur dan ditetapkan dalam kegiatan organisasi, sehingga mampu mengarahkan organisasi merancang tindakan – tindakan untuk merumuskan strategi keuangan yang berkualitas. Sistem pengendalian intern yang belum optimal menyebabkan permasalahan dalam aktivitas pengelolaan keuangan seperti salah saji laporan keuangan yang dapat menyebabkan laporan keuangan kurang akuntabel.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, masih terdapat permasalahan yang tertuang dalam Renstra BPKPD Kabupaten Klungkung, dimana pengelolaan keuangan daerah terkait dengan APBD belum optimal sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang disebabkan oleh : (a) kebutuhan penyediaan laporan pertanggungjawaban akuntansi pendapatan dan penerimaan lainnya yang transparan dan akuntabel belum secara optimal dapat diwujudkan, (b) kebutuhan penyediaan laporan pertanggungjawaban akuntansi belanja dan pengeluaran yang transparan dan akuntabel belum secara optimal sesuai ketentuan dapat diwujudkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi. Dengan demikian peneliti berniat untuk mengambil judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung)”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dengan menguji Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi sektor publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengambil tema akuntansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan untuk seluruh pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung. Terutama untuk pegawai yang berkaitan langsung dalam aktivitas pengelolaan keuangan agar lebih meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah sehingga proses tersebut dapat menjadi pondasi dasar dalam pengambilan keputusan guna mencapai tujuan dan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi menyangkut hubungan kontrak kerja antara *principal* dengan agen. Dimana *principal* adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk menjalankan sistem pemerintahan dan pengelola pemerintahan. Dengan menetapkan strategi yang tepat, pemerintah yang bertindak sebagai agen dapat menghasilkan kinerja yang maksimal, sesuai dengan keinginan pihak *principal*.

Strategi tersebut bisa dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dan pelayanan yang baik terhadap *principal*. Masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah telah menjalankan amanat rakyat apabila kinerja pemerintah terlaksana dengan baik (Subekti, dkk 2015).

Menurut Wahida, (2015) menyatakan bahwa “akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah berkenaan dengan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara jujur serta terbuka kepada publik dan kemudahan akses yang diberikan kepada pihak yang menginginkan informasi tentang penyajian laporan keuangan daerah dengan menganggap bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tersebut”.

Pemerintah sebagai pihak pengelola pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang berkaitan dengan arus sumber daya ekonomi serta bertanggungjawab menyampaikan informasi kepada publik tentang kebijakan yang diambil agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintahan dan mempercayai segala kegiatan finansial yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas publik dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu : akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan sehingga pemerintah harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang nantinya digunakan

sebagai dasar dalam memutuskan kebijakan, dilihat dari pencapaian kinerja pemerintah. Bastian, (2010) menyatakan bahwa “pelaporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kinerja, posisi keuangan dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk mengevaluasi dan membuat keputusan mengenai aktivitas yang dilakukan demi tercapinya tujuan, serta mengevaluasi sumber daya yang dipakai oleh entitas”.

Aksesibilitas laporan keuangan adalah akses yang diberikan kepada seseorang atau pihak terkait yang memerlukan informasi mengenai laporan keuangan daerah agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akses informasi bisa diketahui dari media cetak dan media elektronik. Untuk mengefisienkan waktu, informasi keuangan bisa langsung di akses dari *website* (internet) oleh pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, pemerintah bertanggungjawab dalam meningkatkan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Hal ini secara langsung dapat mendorong akuntabilitas publik.

Untuk memberikan keyakinan kepada publik mengenai laporan keuangan yang disajikan dan layak untuk dipublikasikan diperlukan sistem pengendalian intern yang baik di suatu instansi. Sistem pengendalian intern merupakan metode yang terukur dari suatu organisasi dan menjadi suatu proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan instansi pemerintahan. Semua aktivitas yang dilakukan harus berpedoman pada sistem yang telah ada dengan tujuan dapat menjamin keandalan laporan keuangan, dapat melakukan kegiatan pengamanan aset negara, dapat memfasilitasi kegiatan operasi

pemerintah dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya oleh semua pihak.

Penelitian oleh Hehanussa, (2015), meneliti tentang “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon.

Penelitian oleh Azizah, dkk (2015), meneliti tentang “Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Transparansi, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian oleh Rahma, (2017), meneliti tentang “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem

Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian oleh Purwaningrum, dkk (2018), meneliti tentang “ Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo.

Penelitian oleh Kurniawan dan Rahayu (2019), meneliti tentang “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018.

Penyajian laporan keuangan dapat membantu pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hasil operasi dari arus sumber daya ekonomi. Dengan adanya penyajian laporan keuangan daerah akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karna informasi yang disampaikan sesuai dengan kegiatan perusahaan dan dapat dipublikasikan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini didukung oleh penelitian Rahma (2017) dan Purwaningrum, dkk (2018), yang menyatakan bahwa, Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

Serta penelitian oleh Kurniawan dan Rahayu (2019), yang menyatakan bahwa, Penyajian Laporan Keuangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Agar informasi laporan keuangan dapat dengan mudah dan cepat diketahui publik, maka pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan. Dengan memberikan akses yang terbuka melalui media kepada publik maka secara langsung pemerintah sudah melakukan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Uraian ini didukung oleh penelitian Rahma (2017) dan Purwaningrum, dkk (2018) yang menyatakan bahwa “Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan”. Serta hasil penelitian Kurniawan dan Rahayu (2019), yang menyatakan bahwa “Aksesibilitas Laporan Keuangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan”. Dari uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem pengendalian intern adalah suatu rangkaian kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh pimpinan serta karyawan agar dapat menjamin keandalan laporan keuangan serta dapat mengontrol dan memantau kinerja operasi pemerintah sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang efektif dan efisien. Dengan adanya

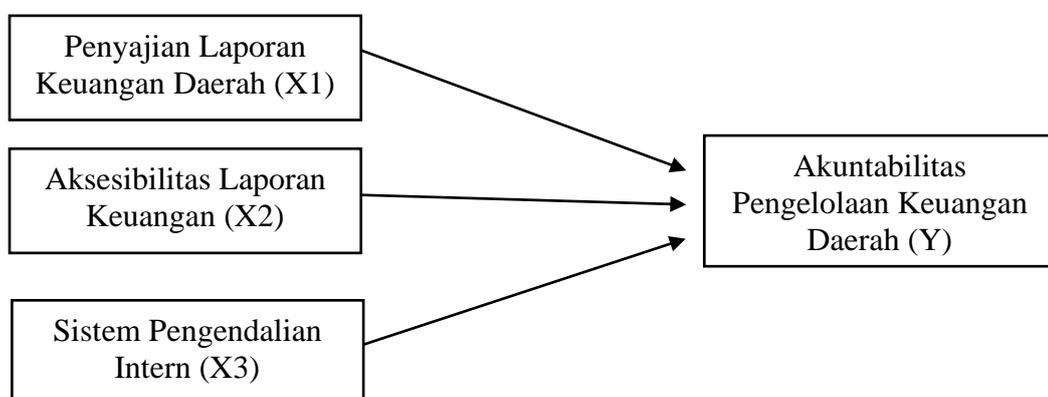
sistem pengendalian intern akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan karna dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan transparan. Uraian ini di dukung oleh hasil penelitian Rahma (2017), yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Serta penelitian oleh Azizah, dkk (2015) yang menyatakan bahwa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian diperlukan untuk menggambarkan pengaruh yang menghubungkan variabel-variabel penelitian yang terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Kerangka berfikir untuk menggambarkan satu variabel dependen yang dipengaruhi oleh tiga variabel independen adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Model Kerangka Berfikir



Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau dependen (Sugiyono, 2015). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1), aksesibilitas laporan keuangan (X2) dan sistem pengendalian intern (X3).

a) Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

Untuk mengetahui informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan diperlukan penyajian laporan keuangan yang akuntabel. Terdapat 4 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 diantaranya : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

b) Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)

Aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Dengan terlaksananya aksesibilitas laporan keuangan yang tepat dapat mewujudkan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Proses inilah yang merupakan media untuk menciptakan transparansi serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun tiga indikator aksesibilitas laporan keuangan menurut Superdi (2017) yaitu : terbuka di media massa, mudah di akses, dan ketersediaan informasi.

c) Sistem Pengendalian Intern (X3)

Sistem pengendalian intern merupakan suatu prosedur yang ditetapkan sebagai cara untuk mengukur dan mengevaluasi sumber daya di suatu organisasi,

mengarahkan beberapa strategi yang dilakukan agar tepat sasaran, serta memberikan pengawasan agar tidak terjadi kasus penggelapan. Adapun lima indikator sistem pengendalian intern menurut Krismiaji (2015) yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi serta komunikasi, dan tugas pemantauan.

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang timbul akibat dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Sugiyono, 2015). Dimana variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

a) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas pengelolaan keuangan daerah seperti penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan untuk mengasihkan kebijakan yang nantinya hasil kebijakan tersebut disampaikan kepada publik. Sehingga publik mempercayai pemerintah sebagai pemegang amanah untuk mengelola kekayaan daerah. Terdapat lima indikator dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Superdi (2017) yaitu : sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, pertanggungjawaban kepada publik, terbuka (cepat dan tepat), penyusunan APBD, dan memonitor kinerja (mengevaluasi manajemen).

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2016 : 79). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung, sebanyak 83 orang.

Menurut Sugiyono (2015), sampel merupakan bagian atau potongan dari populasi yang diteliti dan sampel yang diambil harus mampu mewakili populasi tersebut (*representatif*). Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil sampel dari populasi yang berdasarkan suatu kriteria. Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Pegawai yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan keuangan yaitu : kepala badan, bagian keuangan, bidang aset, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan, bidang anggaran, bidang (pendataan ,penetapan dan pengelolaan data pendapatan daerah) serta bidang (penagihan, keberatan, penelitian dan pelaporan pendapatan).

Untuk mengetahui jumlah populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Populasi dan sampel penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung (Populasi)	83
2	Pegawai yang tidak terlibat dalam aktivitas pengelolaan keuangan di BPKPD Kabupaten Klungkung	(26)
	Total Sampel	57

Dari tabel di atas, diketahui bahwa total sampel yang sesuai dengan kriteria adalah 57 orang.

Dalam penelitian ini untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Agar tidak menghasilkan kesimpulan yang bias dalam penelitian maka data yang digunakan harus valid dan reliabel.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu kuesioner (Ghozali 2016). Uji ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana ketepatan suatu alat ukur yang digunakan. Menurut Jogiyanto (2007), hasil penelitian yang di peroleh dari sebaran kuesioner dinyatakan tidak valid apabila korelasi antara butir skor dengan skor total kurang dari 0,3.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali, (2016) reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur setiap kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Jika jawaban seseorang terhadap pernyataan pada kuesioner stabil dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dikatakan handal dan reliabel. Untuk mengukur reliabilitas suatu data digunakan *Cronbach Alpha* (α) yang dimana diketahui jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka variabel tersebut dapat dikatakan reliabel.

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa tidak terdapat bias pada nilai estimator dari model yang digunakan dalam penelitian sebagai konsekuensi penggunaan analisis statistik parametrik. Pada penelitian ini digunakan tiga uji asumsi klasik yaitu : uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang dilakukan dalam suatu penelitian memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Pendekatan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) digunakan untuk mendeteksi normalitas data. Pedoman pengambilan keputusan untuk mengetahui data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dapat dilihat dari:

- a. Nilai Sig. atau signifikan $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal.
- b. Nilai Sig. atau signifikan $< 0,05$, maka distribusi data adalah tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan agar dapat diketahui diantara variabel penjelas pada model yang digunakan terdapat multikolinearitas atau tidak, dengan indikasi bahwa adanya hubungan yang tinggi diantara beberapa atau keseluruhan variabel penjelas. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value* melalui program SPSS. Jika *tolerance value* di atas 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tidak adanya ketidaksamaan varian antar pengamatan (Ghozali 2016). Pengujiannya dilakukan dengan uji *Glejser* yang meregresi variabel bebas terhadap variabel residual mutlakny dengan signifikansi 5% (0,05), apabila tidak ada variabel yang signifikan secara statistik maka regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas.

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan yang menggambarkan lebih dari satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini untuk memprediksi seberapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian - pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan

X3 = Sistem Pengendalian Intern

e = Standart Error (5%)

Koefisien Detreminasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi yaitu antara nol sampai dengan 1. jika nilai R^2 dibawah 0,5 maka hubungan antara dua variabel sangat lemah. Dan jika nilai R^2 adalah 1, atau mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat.

Tujuan pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan variabel – variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria yang

digunakan adalah jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak.

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial masing – masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan adalah jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh hasil penelitian, data hasil kuesioner diolah dengan menggunakan *SPSS 21 for Windows*. Jumlah kuesioner yang digunakan adalah 57. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah awal pada saat pembagian kuesioner kepada 57 responden. Artinya kuesioner kembali 100%.

Dalam penelitian ini data karakteristik responden ditentukan dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan masa kerja. Dari hasil sebaran kuesioner, maka dapat dikelompokkan karakteristik responden pada tabel 4.1.1.

Tabel 4.1.1
Karakteristik Responden

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Jenis kelamin		
	- Laki – laki	28	49,1
	- Perempuan	29	50,9
	Total	57	100%
2.	Usia saat ini		
	- 17 – 24 tahun	5	8,8%
	- 25 – 30 tahun	6	10,5%
	- ≥ 31 tahun	46	80,7%
	Total	57	100%

3.	Pendidikan terakhir		
	- SMA/Sederajat	2	3,5%
	- Diploma	1	1,7%
	- S1	42	73,7%
	- S2	12	21,1%
	- S3	-	0%
	Total	57	100%
4.	Masa kerja		
	- < 5 tahun	12	21,1%
	- 5 – 10 tahun	11	19,3%
	- > 10 tahun	34	59,6%
	Total	57	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.1.1, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden perempuan yang berjumlah 29 orang (50,9%) dan sisanya laki – laki berjumlah 28 orang (49,1%). Karakteristik responden berdasarkan usia di dominasi oleh usia ≥ 31 tahun dengan jumlah 46 orang (80,7%). Kemudian usia 25 – 30 tahun berjumlah 6 orang (10,5%) dan usia 17 – 24 tahun berjumlah 5 orang (8,8%).

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yang paling dominan adalah lulusan S1 dengan jumlah 42 orang (73,7%). Kemudian S2 berjumlah 12 orang (21,1%). Selanjutnya SMA/Sederajat berjumlah 2 orang (3,5%) dan Diploma berjumlah 1 orang (1,7%). Karakteristik responden berdasarkan masa kerja yang paling banyak adalah masa kerja > 10 tahun dengan jumlah 34 orang (59,6%). Kemudian diikuti masa kerja responden < 5 tahun dengan 12 orang (21,1%) dan masa kerja 5 – 10 tahun dengan jumlah 11 orang (19,3%).

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya hasil kuesioner penelitian. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dengan skor total seluruh item pertanyaan yang dilakukan kepada 57 responden. Valid atau tidaknya hasil penelitian dilihat dari nilai *pearson correlation* dari tiap butir

pernyataan. Jika butir pernyataan memiliki koefisien korelasi $< 0,3$ maka pernyataan tersebut tidak valid. Tetapi Jika koefisien korelasi adalah $> 0,3$ maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah hasil data kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan handal atau reliabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* dari masing – masing item pernyataan dalam suatu variabel yang dilakukan kepada 57 responden. Apabila butir pernyataan dalam suatu variabel memiliki nilai *cronbach alpha* diatas 0,60 ($> 0,60$) maka data yang dihasilkan dikatakan reliabel. Untuk melihat hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada table 4.1.2.

Tabel 4.1.2
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Correlations	Cronbach Alpha
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	0,725 – 0,824	0,909
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,569 – 0,869	0,825
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,746 – 0,879	0,939
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,662 – 0,823	0,904

Sumber : Lampiran 4

Dengan melihat tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *correlations* untuk masing – masing variabel adalah diatas 0,3 yang berarti semua item pernyataan yang terdapat pada variabel independen maupun variabel dependen dinyatakan valid. Dan untuk menilai reliabilitas suatu data dapat dilihat pada nilai *cronbach*

alpha dimana nilai dari masing – masing variabel adalah di atas 0,60 yang berarti data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai objek penelitian sebagai sampel penelitian dan diharapkan mampu memberikan gambaran awal mengenai masalah yang diteliti. Dengan hasil penyebaran kuesioner diperoleh nilai uji statistik deskriptif yang dapat dilihat pada lampiran 4. Berikut akan diuraikan hasil uji statistik deskriptif seperti berikut :

1. Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah memiliki jumlah sampel sebanyak 57, dengan nilai minimum 29, nilai maksimum 40, dan mean 35,7719. Standart Deviation sebesar 3,55577.
2. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki jumlah sampel sebanyak 57, dengan nilai minimum 23, nilai maksimum 30, dan mean 26,6842. Standart Deviation sebesar 2,18074.
3. Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki jumlah sampel sebanyak 57, dengan nilai minimum 31, nilai maksimum 45, dan mean 39,2456. Standart Deviation sebesar 4,01017.
4. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki jumlah sampel sebanyak 57, dengan nilai minimum 35, nilai maksimum 45, dan mean 41,0702. Standart Deviation sebesar 3,42710.

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model yang digunakan dan agar tidak menyimpang dari asumsi metode kuadrat terkecil. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* yang tersedia dalam program *SPSS 21.00 For Windows*. Menurut Ghozali, (2006), data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang diperoleh adalah $> 0,05$. Dapat dilihat pada lampiran 4 diperoleh nilai signifikansi adalah 0,673. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas antar variabel independen dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika *tolerance* lebih besar dari 10% dan VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada lampiran 4 dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa, nilai *tolerance* semua variabel independen diatas 10% yaitu, (X1=0,314; X2=0,376; X3=0,308) dan nilai VIF kurang dari 10 yaitu, (X1=3,181; X2=2,662; X3=3,251) hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat multikolinearitas.

Pada penelitian ini digunakan uji *Glejser* untuk menguji apakah model yang digunakan mengandung heteroskedastisitas atau tidak. Metode ini dilakukan dengan meregresi variabel bebas terhadap variabel residual mutlaknya. Jika hasil yang diperoleh adalah nilai signifikansi diatas 5% (0,05), maka model regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas. Hasil data yang diperoleh dapat dilihat pada lampiran 4. Dari uji statistik menunjukkan bahwa semua variabel

independen memperoleh nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu ($X_1=0,637$; $X_2=0,061$; $X_3=0,779$). Dengan adanya hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda merupakan suatu model yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Dengan tujuan untuk memprediksi seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang terdapat pada lampiran 4 maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 8,039 + 0,698 X_1 + 0,221 X_2 + 0,056 X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah 8,039. Hal tersebut menunjukkan apabila variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern dianggap konstan, maka rata-rata akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 8,039 satuan.
2. Koefisien penyajian laporan keuangan daerah adalah 0,698. Maka apabila setiap peningkatan satu satuan penyajian laporan keuangan daerah dengan asumsi variabel independen lain yang konstan akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,698 satuan.
3. Koefisien aksesibilitas laporan keuangan adalah 0,221. Maka apabila setiap peningkatan satu satuan aksesibilitas laporan keuangan dengan asumsi variabel independen lain yang konstan akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,221 satuan.

4. Koefisien sistem pengendalian intern adalah 0,056. Maka apabila setiap peningkatan satu satuan sistem pengendalian intern dengan asumsi variabel independen lain yang konstan akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,056 satuan.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. *Adjusted R-Square* merupakan koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini. Besarnya koefisien determinasi yang digunakan adalah antara nol sampai dengan satu. Menurut Ghazali, (2011), jika nilai R^2 dibawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil dan sebaliknya jika nilai R^2 mendekati 1 artinya korelasi antara variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Dari hasil regresi yang diperoleh pada lampiran 4 diketahui nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.777. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 77,7% variabel independen dijelaskan oleh variabel dependen dan 22,3% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain.

Uji F digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan adalah jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak. Hasil pengujian dengan uji Anova yang terdapat pada lampiran 4 menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 65.897 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai signifikansinya dibawah 0,05, maka

diperoleh keputusan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara langsung masing – masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi pada lampiran 4 maka disimpulkan hasil uji t sebagai berikut :

- a. Variabel X1 memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0.698 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y.
- b. Variabel X2 memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0.221 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,179, hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
- c. Variabel X3 memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0.056 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,569, hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Dari hasil persamaan regresi berganda pada uji t, dapat dilihat bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dikatakan berpengaruh karena nilai signifikansi variabel adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh BPKPD Kabupaten

Klungkung sudah dapat dikatakan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sehingga dapat memberikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Dimana laporan keuangan sudah di sajikan secara lengkap dan jujur mengenai laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian penyajian laporan keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Purwaningrum, dkk (2018) yang menyatakan bahwa, Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

Dilihat dari hasil persamaan regresi berganda pada uji t, diketahui bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi variabel adalah 0,179 lebih besar dari 0,05. Tidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena kemudahan akses kepada *stakeholder* mengenai laporan keuangan BPKPD Kabupaten Klungkung belum optimal. Serta kemudahan akses informasi melalui media masih perlu ditingkatkan karena informasi laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Azizah, dkk (2015) yang menyatakan bahwa, Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada uji t, diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi variabel adalah 0,569 lebih besar dari 0,05. Tidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena BPKPD Kabupaten Klungkung belum menerapkan adanya penentuan batas dan penentuan toleransi penilaian resiko, belum menerapkan pemisahan tugas yang memadai karena masih ada pegawai yang merangkap jabatan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Melisha, (2018) yang menyatakan bahwa, Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung.
2. Hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung.

3. Hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk BPKPD Kabupaten Klungkung harus lebih memperhatikan Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan BPKPD Kabupaten Klungkung. Tujuannya agar segala aktivitas pengelolaan keuangan dari bidang – bidang yang terkait dapat dipertanggungjawabkan atau laporan yang dihasilkan dapat diinformasikan secara akuntabel baik dari segi vertikal maupun dari segi horizontal.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar memperluas atau menambah populasi dan sampel penelitian serta dapat menambah variabel lain yang mungkin akan lebih berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N.dkk. (2015). Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi : Akuntansi dan Manajemen. Vol.1, No.2, September 2015, hlm. 111 – 120.*
- Bastian, Indra.(2010). *Audit Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- , Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon. *Conference in Business, Accaounting, and Management, Vol.2 No.1, 82–90. ISSN 2302 – 9791*.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keprilakuan*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi. In Edisi keempat*.
- Kurniawan D, Rahayu. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018). *e-Proceeding of Management: Vol.6, No.1 April 2019 / Page 705. ISSN : 2355-9357*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Purwaningrum S, dkk. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponogoro. *Jurnal: Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi. Volume 2 No. 1 April 2018, Halaman 67-77. ISSN : 2598-7496*.
- Putri, Melisha. (2018). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri). Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

- Rahma, Nuria. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fekom, Vol. 4 No. 2 (Oktober) 2017*.
- Somad, Abdus. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang).. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA). Volume: xx. Universitas kanjuruhan Malang. ISSN: 2337-56xx*
- Subekti, dkk. (2015). Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Studi Persepsi Pengguna Eksternal Laporan Keuangan Kota Banjarmasin). *JSAI, 2(1), 72–85*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- . (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : PT Alfabet.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Sijunjung). *JOM Fekom, Vol.4 No.1, 2015–2029*.
- Wahida. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksestabilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Konawe Utara . Universitas Hasanuddin Makasar.